**HERMAN WILLEM DAENDELS DALAM PUSARAN KERJA PAKSA PEMBANGUNAN JALAN RAYA POS, JALAN DAENDELS**

**Fitriyana Damayanti, Ghumayda Tsurayya, Prof. Dr. Aman, M.Pd., dan Asyhar Basyari, M.Pd.**

Universitas Negeri Yogyakarta

**Abstrak**

Pada tahun 1806, Louis Napoleom diangkat menjadi pemimpin di Belanda yang kemudian memerintahkan Herman Willem Daendels menjadi gubernul jendral di Hindia Belanda. Daendels menyusun kebijakan-kebijakan baru dibidang politik, peradilan, ekonomi, administrasi, militer, dan sebagainya yang nantinya akan memberikan perubahan di Hindia Belanda. Salah satu kebijakannya yang paling mencolok pada masa kepemimpinan Daendels adalah pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan dengan menggunakan sistem kerja. Tenaga pribumi diperas hingga menimbulkan banyak korban jiwa selama masa pembangunan jalan raya pos tersebut. Pembangunan jalan dilakukan semata-mata untuk mempermudah mobilisasi militer dan ekonomi para koloni Belanda. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai fakta menarik pelaksanaan kebijakan kerja paksa untuk pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan dan mengungkap sisi lain mengenai kontroversi dari pembangunan jalan tersebut.

**Kata kunci: Daendels, Jalan Raya Pos, Belanda**

***Abstract***

*In 1806, Louis Napoleom was appointed leader in the Netherlands who then ordered Herman Willem Daendels to become gubernul general in the Dutch East Indies. Daendels formulated new policies in the fields of politics, justice, economy, administration, military, and so on that would later provide changes in the Dutch East Indies. One of his most striking policies during Daendels' tenure was the construction of the Anyer to Panarukan highway using a work system. Indigenous workers were squeezed to the point of causing many casualties during the construction of the postal highway. The construction of roads was carried out solely to facilitate the military and economic mobilization of the Dutch colonies. In this study, researchers will examine interesting facts about the implementation of the forced labor policy for the construction of the Anyer-Panarukan highway and reveal another side of the controversy over the construction of the road.*

***Keywords: Daendels, Postal Highway, Netherlands***

**Latar Belakang**

Pada abad ke-18 akhir, Eropa mengalami perubahan yang besar, yakni adanya Revolusi Prancis dan pengangkatan Napoleon Bonaparte menjadi seorang pemimpin Prancis. Semenjak diangkatnya Napoleon, berbagai upaya agresi terus dilaakukan ke berbagai penjuru Eropa, termasuk ke Belanda. Tahun 1794-1795 Prancis menyerang Belanda dan Belanda berhasil takluk di tangan Prancis.[[1]](#footnote-1)

VOC, kongsi dagang milik Belanda yang memiliki kekuasan besar di Hindia Belanda mengalami kebangkrutan akibat adanya praktik korupsi para pegawainya. Adanya peristiwa tersebut membuat pemerintah Belanda melakukan penyelidikan yang berujung VOC dibubarkan di tahun 1800. Pada waktu tersebut pemerintah Belanda secara resmi mengambil tongkat kekuasaan VOC di Batavia yang kemudian mengubah pemerintahan tersebut menjadi Republik Bataaf. [[2]](#footnote-2)

Di tahun 1806, Louis Napoleom diangkat oleh Napoleon sebagai pemimpin di Belanda. Louis Napoleon selaku pemimpin baru di Belanda memerintahkan

Herman Willem Daendels menjadi gubernul jendral di Hindia Belanda. Tiba di Hindia Belanda, Daendels mulai menyusun berbagi kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa sistem politik, peradilan, ekonomi, administrasi, militer, dan sebagainya yang nantinya akan memberikan perubahan di Hindia Belanda. [[3]](#footnote-3)

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa, Daendels memanfaatkan pribumi di Hindia Belanda untuk melaksanakan program kebijakan-kebijakan miliknya, salah satu kebijakannya yang paling mencolok saat itu ialah pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan dilakukan dengan menggunakan sistem kerja paksa. Tenaga pribumi diperas hingga menimbulkan banyak korban jiwa selama masa pembangunan jalan raya tersebut. Pembangunan jalan tersebut dilakukannya semata-mata guna mempermudah mobilisasi militer dan ekonomi para koloni Belanda. Banyak sekali asumsi masyarakat mengenai Daendels melakukan genosida terhadap pribumi di Hindia Belanda dan membiarkan para pekerja paksa bekerja tanpa upah.

**Metode**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang mengarah kepada fenomena yang terdapat di lapangan. Peneliti mengkaji sumber dengan tidak mengabaikan teori serta metodelogi sejarah di dalamnya. Sumber utama yang digunakan adalah buku *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* karya Pramoedya Ananta Toer. Kemudian untuk sumber penunjang lain adalah berbagai jurnal, artikel, dan berita yang relevan dengan fokus pembahasan pada penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode analisis pada penelitian ini dengan melakukan pendekatan historis. Proses analisis dengan menggunakan pendekatan historis terdapat tiga kemungkinan yaitu, dengan cara menggabungkannya dengan disiplin ilmu lain, implisit, atau eksplisit. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan cara implisit. Dengan begitu, penelitian ini berusaha guna mengaitkan dengan ruang lingkup dari sejarah nasional.

Proses cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan memalui langkah-langkah, yakni yang petama dengan membaca buku *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* karya Pramoedya Ananta Toer. Kemudian yang kedua dengan melakukan verifikasi antara sumber utama dengan sumber-sumber penunjang. Selanjutnya peneliti akan mengungkapkan mengenai fakta serta mengungkap sisi lain dari pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan.

**Pembahasan**

Herman Willem Daendels merupakan gubernur jendral Hindia Belanda yang dikirimkan oleh Louis Napoleon untuk memimpin pulau Jawa. Daendels tidak semata-mata memimpin Hindia Belanda, Daendels membuat kebijakan-kebijakan baru yang dimanfaatkannya untuk kepentingan pemerintahan Belanda. pada masa pemerintahannya Daendels senantiasa menanamkan prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner.[[4]](#footnote-4)

Gagasan dan pembaruan yang dibawa Daendels dimaksudkan untuk menumpas berbagai manipulasi hingga tindak korupsi yang terjadi di tanah Jawa. Di Hindia Belanda, Daendels banyak ditakuti oleh para Dewan Hindia. Dalam pelaksanaan kebijakannya seluruh hal Daendels perkirakan dan dilakukannya sendiri. Daendels merasa bahwa dirinya merupakan seorang diktator. Kekuasaan dan kebijakan yang diciptakan Daendels banyak memberikan pengaruh yang luar biasa, Namanya cukup dikenal karena pencapaiannya, namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak orang-orang yang tidak menyukai Daendels sebab kepentingan orang yang bersangkutan banyak digagalkan oleh Daendels.[[5]](#footnote-5)

Tugas utama Daendels pada awalnya ialah melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan mempertahankan Batavia dari serangan Inggris. Namun, pada masa pemerintahannya, Daendels menerapakan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah pembangunan jalan raya dari Anyer-Panarukan dengan panjang kurang lebih 1000 kilometer. Jalan raya tersebut dikenal dengan nama Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Pembangunan jalan raya tersebut awalnya hanya sekadar pelebaran dan perbaikan jalan dari Anyer hingga Batavia. Pada dasanya, ketika Daendels tiba di Batavia, jalan raya tersebut sudah ada.[[6]](#footnote-6)

Adanya kepentingan ekonomi serta militer pada masa pemerintahan Daendels, pulau Jawa memerlukan jalur yang dapat menghubungkan antar wilayah. Dalam pelaksanaan kebijakannya untuk membangun jalan raya pos baru, Daendels mengerahkan pribumi Jawa untuk melakukan kerja rodi. Kerja rodi yang dilakukan tidak hanya membangun jalan raya pos, namun juga memperbaiki dan meningkatkan jalan raya pos yang sudah ada agar kemudian menjadi lebih baik lagi dan dapat memudahkan para pemerintah Belanda melakukan mobilisasi. Hal tersebut yang menjadi cikal bakal kesengsaraan kehidupan pribumi, dalam pembangunan jalan raya pos diperkirakan telah menelan korban kurang lebih sebanyak 12.000 orang.[[7]](#footnote-7)

Pekerja paksa, yakni pribumi yang melakukan kerja rodi selama pembangunan jalan raya pos sangat lekat pada masa kolonialisme Belanda. Kerja paksa yang dilakukan Daendels dalam pembangunan jalan raya pos banyak mengeksploitasi Sumber Daya Manusia di Hindia Belanda. Sistem kerja paksa berlaku diberbagai daerah dan biasanya terjadi di daerah-daerah perkebunan.[[8]](#footnote-8)

Daendels memang terbilang kejam dalam melaksanakan kebijakannya, namun, terdapat fakta menarik mengenai pelaksanaan kebijakan kerja paksa tersebut. Banyak masyarakat berasumsi bahwa Daendels melakukan kerja paksa tanpa memberi upah kepada para pekerja. Asumsi masyarakat mengenai apakah Daendels benar-benar kejam hingga tidak memberikan sepersen pun upah kepada para pekerja atau justru sebaliknya, Daendels memberikan upah kepada para pekerja, namun upah tersebut tidak sampai ke tangan para buruh.

Akhir-akhir ini, banyak narasi sejarah yang mengungkap sisi lain mengenai kontroversi pembangunan jalan raya pos tersebut. Narasi mengenai kerja paksa yang dilakukan Daendels dibantah. Disebutkan bahwa faktanya Daendels memberikan upah kepada para pekerja selama proses pembuatan jalan raya pos. Hal tersebut akhirnya banyak dikaji oleh sejarawan Indonesia mengenai kebenarannya.[[9]](#footnote-9)

Pada tahun 1808 Daendels memutuskan untuk melakukan pembangunan jalan raya dari daerah Bogor hingga ke daerah Cirebon dengan jarak kurang lebih 150 kilometer. Menurut Djoko Marihandono selaku sejarawan Universitas Indonesia, pelaksanaan kerja paksa dalam membangun jalan raya Bogor-Cirebon dilakukan dengan membayar upah kepada para pekerja. Upah disiapkan oleh direktur keuangan Belanda, Van Ijsseldjik untuk membayar para buruh dan mandor, juga peralatan, dan makanan. Djoko memaparkan, dalam pembangunan jalan raya pos BogorCirebon Daendels telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit dan ditambah dengan uang kertas dengan nominal yang cukup besar. Pemberian bayaran tersebut dilakukan atas dasar beratnya medan yang ditempuhnya selama pembangunan.[[10]](#footnote-10)

Dalam wawancara bersama historia.id, Djoko juga mengungkapkan, dana yang telah disiapkan memang tidak secara langsung diberikan kepada para pekerja, namun, upah tersebut diberikan kepada para pejabat setingkat residen dan diaslurkan kepada para bupati lokal. Terdapat bukti mengenai pemberian upah yang dilakukan oleh Daendels. Namun, bukti mengenai pemberian upah dari bupati local kepada para pekerja belum ditemukan.[[11]](#footnote-11)

Setelah selesainya pembangunan jalan raya pos Anyer hingga Panarukan, mobilisasi pemerintah belanda dan pribumi menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya, jalan raya pos yang dibangun Daendels menjadi infrasktruktur penting. Dalam pengelolaan jalan dan pengaturannya, Daendels memberikan tiga peraturan penting.

Peraturan pertama tahun 1809 berisi terkait aturan umum yang berlaku dalam memanfaatkan jalan raya, pengaturan dan pengelolaan pos surat, serta segalanya yang berkaitan dengan kereta, komisaris, dinas pos, dan jalan. Peraturan yang kedua dikeluarkan pada tahun 1810, yakni mengenai penyempurnaan terhadap jalan raya pos serta pengaturan terhadap tenaga pengangkut pos dan gerobaknya. Peraturan yang terakhir ditahun yang sama, yakni mengenai penggunaan kereta kuda atau kerbau untuk mengangkut barang milik swasta maupun pemerintah dari Jakarta hingga Surabaya.[[12]](#footnote-12) Maksud awal Daendels dalam membangun jalan raya pos Anyer hingga Panrukan memang ditujukan untuk kepentingan ekonomi dan militer. Namun, jalan raya pos ini kemudian digunakan guna kepentingan surat-menyurat dan komunikasi antar daerah yang dikuasai oleh Daendels.[[13]](#footnote-13)

Kiprah Daendels sangat besar dalam pembangunan jalan raya pos Anyer hingga Panarukan. Disaat pemimpin lain melakukan pembangunan jalan yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya, Daendels melakukan pembangunan jalan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Atas kebijakannya tersebut jalan raya pos Anyer hingga Panarukan menjadi infrastruktur yang membantu banyak orang dalam melakukan mobilisasi ke tiap-tiap daerah. Disamping banyaknya manfaat yang diberikan atas pembangunan jalan raya pos tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masa pembangunannya, jalan raya pos Anyer hingga Panarkan menyimpan luka kelam dan kesengsaran pribumi di Hindia Belanda.

**Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan dilakukan dengan menggunakan sistem kerja paksa yang tenaga dari pribumi diperas hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Daendels memang terbilang kejam dalam melaksanakan kebijakannya. Akan tetapi, terdapat fakta menarik mengenai pelaksanaan kebijakan kerja paksa tersebut. Banyak masyarakat berasumsi bahwa Daendels melakukan kerja paksa tanpa memberi upah kepada para pekerja. Namun, Daendels tetap memberikan upah kepada para pekerja, akan tetapi upah tersebut tidak sampai ke tangan para buruh. Dana yang telah disiapkan memang tidak secara langsung diberikan kepada para pekerja, namun, upah tersebut diberikan kepada para pejabat setingkat residen dan disalurkan kepada para bupati lokal. Terdapat bukti mengenai pemberian upah yang dilakukan oleh Daendels. Namun, bukti mengenai pemberian upah dari bupati lokal kepada para pekerja belum ditemukan.

Pembangunan jalan raya pos Anyer hingga Panarukan dengan jarak 1000 kilometer, lebar jalan yang dibangun yakni kurang lebih sekitar 7,5 meter atau dua *roed* dimana satu *roed* dihitung sekitar 3,767 meter persegi. Setiap 1506,9 meter atau sekitar 400 *roed* diberi penanda berupa tonggak/*paal* sebagai tanda panjang jalan. Kemudian pada sisi kanan dan kiri jalan dibuat selokan sebagai saluran air agar tidak menggenang jalanan. Pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan berpengaruh pada mobilisasi pemerintah belanda dan pribumi menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya sehingga jalan raya pos yang dibangun Daendels menjadi infrasktruktur penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

Elisa, D. S. (n.d). Sistem Pemerintah Herman Willem Daendels di Jawa (1808-1811). Tersedia pada [(DOC) SISTEM PEMERINTAHAN HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA (1808-1811) | Elisa Dwy Sanusi - Academia.edu](https://www.academia.edu/34599378/SISTEM_PEMERINTAHAN_HERMAN_WILLEM_DAENDELS_DI_JAWA_1808_1811_). Diakses pada 20 September 2022.

Endah, S. H. (2016). Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam hingga Pemerintahan Daendels. *Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 26, No. 2.

Hendri F. I. (2015). Sepuluh Fakta dibalik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan. Tersedia pada [Sepuluh Fakta di Balik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan - Historia](https://historia.id/kuno/articles/sepuluh-fakta-di-balik-pembangunan-jalan-daendels-dari-anyer-ke-panarukan-6ae2W/page/1). Diakses pada 22 September 2022.

Hery H. W. (2013). Jalan Raya Pos, Jalan Bersejarah Terkejam di Nusantara. Tersedia pada [Jalan Raya Pos, jalan bersejarah terkejam di Nusantara | merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-raya-pos-jalan-bersejarah-terkejam-di-nusantara.html). Diakses pada 22 September 2022.

Imam, D. S. (2020). Masa Pemerintahan Republik Bataaf. Tersedia pada [Masa Pemerintahan Republik Bataaf Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/06/190231769/masa-pemerintahan-republik-bataaf?page=all). Diakses pada 22 September 2022.

Mujihadi. (2017). Genosida Terhadap Orang-Orang Nusantara dalam Esai Jalan Raya Pos, Jalan Daendels Karya Pramoedya Ananta Toer, *Paramasastra*, Vol. 4, No. 2.

Pramoedya, A. T. (2005). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Rakhmad, H. P. (2021). Daendels Bayar Upah Pekerja Jalan Anyer Panarukan tapi dikorupsi, Benarkah?. Tersedia pada [Daendels Bayar Upah Pekerja Jalan Anyer-Panarukan tapi Dikorupsi, Benarkah? (detik.com)](https://news.detik.com/berita/d-5365828/daendels-bayar-upah-pekerja-jalan-anyer-panarukan-tapi-dikorupsi-benarkah). Diakses pada 21 September 2022.

Yoni, P. (n.d). Ketika Si Tuan Besar Berkuasa: Sejarah Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tersedia pada <https://www.academia.edu/12016169/sejarah_pemerintahan_gubernur_jenderal_herman_willem_d%20aendels_1808_1811_>. Diakses pada 20 September 2022.

1. Yoni Prawardayana. (n.d). Ketika Si Tuan Besar Berkuasa: Sejarah Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tersedia pada <https://www.academia.edu/12016169/sejarah_pemerintahan_gubernur_jenderal_herman_willem_d%20aendels_1808_1811_>. Diakses pada 20 September 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam Daniel Sihombing. (2020). Masa Pemerintahan Republik Bataaf. Tersedia pada [Masa Pemerintahan Republik Bataaf Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/06/190231769/masa-pemerintahan-republik-bataaf?page=all). Diakses pada 22 September 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yoni Prawardayana. *loc.cit*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Elisa Dwy Sanusi. (n.d). Sistem Pemerintah Herman Willem Daendels di Jawa (1808-1811). Tersedia pada [(DOC) SISTEM PEMERINTAHAN HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA (1808-1811) | Elisa Dwy Sanusi - Academia.edu](https://www.academia.edu/34599378/SISTEM_PEMERINTAHAN_HERMAN_WILLEM_DAENDELS_DI_JAWA_1808_1811_). Diakses pada 20 September 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Pramoedya Ananta Toer. (2005). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mujihadi. (2017). Genosida Terhadap Orang-Orang Nusantara dalam Esai Jalan Raya Pos, Jalan Daendels Karya Pramoedya Ananta Toer, (*Paramasastra*, Vol. 4, No. 2), hlm. 274-275. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rakhmad Hidayatulloh Permana. (2021). Daendels Bayar Upah Pekerja Jalan Anyer Panarukan tapi dikorupsi, Benarkah?. Tersedia pada [Daendels Bayar Upah Pekerja Jalan Anyer-Panarukan tapi Dikorupsi, Benarkah? (detik.com)](https://news.detik.com/berita/d-5365828/daendels-bayar-upah-pekerja-jalan-anyer-panarukan-tapi-dikorupsi-benarkah). Diakses pada 21 September 2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hendri F. Isnaeni. (2015). Sepuluh Fakta dibalik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan. Tersedia pada [Sepuluh Fakta di Balik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan - Historia](https://historia.id/kuno/articles/sepuluh-fakta-di-balik-pembangunan-jalan-daendels-dari-anyer-ke-panarukan-6ae2W/page/1). Diakses pada 22 September 2022. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Endah Sri Hartatik. (2016). Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam hingga Pemerintahan Daendels. (*Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 26, No. 2), hlm. 160-161. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hery H. Winarno. (2013). Jalan Raya Pos, Jalan Bersejarah Terkejam di Nusantara. Tersedia pada [Jalan Raya Pos, jalan bersejarah terkejam di Nusantara | merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-raya-pos-jalan-bersejarah-terkejam-di-nusantara.html). Diakses pada 22 September 2022. [↑](#footnote-ref-13)